



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



JUMAT KLIWON

3 MEI 2024 (23 SAWAL 1957 / TAHUN LXXIX NO 204)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN



PAMERAN KARYA PELAJAR: Pengunjung mengamati lukisan saat pameran seni rupa karya pelajar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Kamis (2/5/2024). Pameran yang menampilkan karya dari pelajar SMKN 3 Kasihan Bantul, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tersebut dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024.

KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

'BERGERAK BERSAMA LANJUTKAN MERDEKA BELAJAR' Pendidikan Sudah Berada di Jalur yang Benar

JAKARTA (KR) - Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin Gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh.

Demikian diungkapkan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ketika berpidato pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Kemendikbudristek Senayan Jakarta,

Kamis (2/5). Tema Hardiknas tahun ini 'Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar'.

Nadiem menegaskan, saat ini dunia pendidikan sudah berada di jalur yang benar, tetapi tugas seluruh elemen pendidikan untuk terus mengawalinya masih belum selesai. Ia mengajak semua pihak meneruskan gerakan Merdeka Belajar secara berkelanjutan. "Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan seko-

lah yang kita cita-citakan," tuturnya dalam pidato saat menjadi pembina upacara.

Bagi Nadiem, menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar telah menyadarkannya tentang tantangan sekaligus kesempatan yang bisa diraih Indonesia dalam memajukan dunia pendidikan. Ia mengakui, bukan hal mudah mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan pula sebuah tugas yang

* Bersambung hal 7 kol 5

Anggaran Pengembangan Ekonomi Rp 71 T Tiap Desa Bakal Terima Rp 943 Juta

YOGYA (KR) - Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 609,68 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan ekonomi desa sepanjang 2015 hingga 2024. Khusus pada 2024, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun untuk pengembangan ekonomi pada 75.259 desa di 434 kota/kabupaten, sehingga tiap desa diperkirakan menerima dana sebesar Rp 943,34 juta.

"Perkembangan Dana Desa tak kurang dari Rp 609 triliun sejak 2015 hingga 2024," kata Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Jaka Sucipta di Gunungkidul DIY, Kamis (2/5).

Dijelaskan, Dana Desa selama ini digunakan untuk pembangunan sarana penunjang aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa serta program pencegahan dan penanganan stunting. Sejumlah hasil capaian Dana Desa pada pembangunan sarana penun-

jang. Di antaranya jalan desa sepanjang 33.657 kilometer, jembatan 129.979 me-

ter, pasar desa 515 unit, irigasi 31.142 unit, penahan tanah 9.287 unit, sarana olahraga 2.172 unit, air bersih 86.750 unit, polindes 2.248 unit, drainase 3.191.307 meter, PAUD 2.547 kegiatan, posyandu 2.587 unit dan sumur 8.031 unit.

Sementara hasil untuk program pencegahan dan penanganan stunting di antaranya posyandu 9.352 unit, air bersih 10,12 juta unit, fasilitas umum MCK (mandi, cuci, kakus) 77.168 unit, polindes 79.928 unit, PAUD 10.495 unit, drainase 29.557.922 meter, dan sumur bor 31,01 juta unit.

"Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan tindakan promotif dan preventif, serta kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Untuk tahun ini, Pemerintah berencana menggunakan Dana Desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai (BLT) 25 persen dan mendukung program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen," tambah Jaka.

(Ant/Has)-d

Analisis Pendidikan Politik

Drs Johannes Eka Priyatna MSc PhD



PENDIDIKAN dewasa ini mengalami tantangan yang maha berat. Tantangan menjadi semakin berat manakala menyangkut sikap, nilai-nilai, dan kesadaran. Tantangan itu salah satunya berasal dari masifnya gejala demokratisasi pengetahuan. Gejala ini memungkinkan siapapun sekaligus mengonsumsi dan memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai dengan mudah lewat jaringan komputer. Akibatnya, kebenaran menjadi semakin relatif sehingga tirani mayoritas sering menyingkirkan rasionalitas dan keadaban publik.

Sebagai bangsa yang besar nan beragam, kita telah memilih demokrasi modern sebagai jalan menuju kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan. Pilihan ini bukan tanpa risiko justru di era post truth dan kecerdasan buatan (AI) ini. Di era ini, kebenaran dan rasionalitas menjadi rumit dikelola karena AI memudahkan pemalsuan dan manipulasi.

Meskipun Yuval N. Harari (2018, h.45) dalam bukunya '21 Lesson for 21st Century' beranggapan bahwa demokrasi bukanlah sistem pengambilan keputusan yang rasional, tetapi rasionalitas dan etika sepatutnya menjadi pondasi utama demokrasi.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024, kiranya tepat bagi kita untuk merefleksikan perjalanan

* Bersambung hal 7 kol 1

PERSIAPAN PILKADA SERENTAK 2024

Tito: DP4 Mencapai 207 Juta Jiwa

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) mencapai 207.110.768 jiwa di Pilkada Serentak 2024. Data tersebut secara langsung diserahkan Kemendagri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai persiapan perumusan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2024 yang digelar 27 November 2024.

"Jumlah DP4 207.110.768 jiwa per 27 November 2024," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (2/5).

Berdasarkan data tersebut, jumlah DP4 didominasi perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa. Sementara, jumlah DP4 laki-laki tercatat 103.228.748 jiwa.



Mendagri Tito Karnavian menyerahkan DP4 untuk Pilkada 2024 kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta.

KR-Antara/Aditya Pradana Putra

Menurutnya, dinamika data kependudukan di Indonesia sangat tinggi karena dipengaruhi sejumlah faktor, yakni terkait jumlah penduduk yang meninggal, pindah domisili, hingga dihapusnya hak pilih karena terdaftar sebagai aparat TNI-Polri.

"Rata-rata penerbitan akta kematian per bulan

selama tahun 2023 yakni 165.758 jiwa, rata-rata peristiwa pindah datang per bulan selama tahun 2023 sejumlah 676.856 jiwa serta adanya perubahan pekerjaan TNI-Polri," jelasnya.

Tito mengatakan, kriteria penduduk yang masuk ke dalam DP4 Pilkada Serentak 2024. Pertama,

* Bersambung hal 7 kol 5

SIDANG PHPU PILEG

MK Menegur, KPU Tak Menyepelekan

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon menegaskan, tak menyepelekan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Betty merespons hakim konstitusi yang menyoroti ketidakhadiran Komisioner KPU RI dalam persidangan panel tiga dan Ketua KPU RI yang meminta izin meninggalkan sidang panel satu.

"Tidak menyepelekan lah, karena ada sejumlah agenda yang bersamaan," ujar Betty di Kantor KPU Jakarta, Kamis (2/5).

Ia menjelaskan, pada hari Kamis kemarin ada sejumlah agenda yang harus dihadiri Komisioner KPU RI. Oleh karena itu, mereka saling berbagi tugas untuk menghadiri agenda tersebut. Betty mengaku hadir dalam persidangan PHPU Pileg 2024 di MK. "Saya ada kok tadi (hadir di MK)," katanya.

Hal senada disampaikan Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin yang menyebutkan, ada tiga agenda bersamaan yang harus dihadiri pada Kamis kemarin, yaitu Sidang MK PHPU Pileg 3 panel, uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi dan penyerahan DP4 dari Pemerintah (Kemendagri) kepada KPU.

"Dengan demikian kami anggota KPU berbagi tugas dan dalam sidang MK untuk semua perkara KPU sudah menyiapkan kuasa hukum," jelas Afifuddin.

Ia menuturkan, KPU sangat serius menanggapi

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:39	14:59	17:33	18:44	04:23

Jumat, 3 Mei 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Dari 88.593 Kasus DBD, 621 Orang Meninggal

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan RI mencatat, terdapat 621 kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) pada minggu ke-17 tahun 2024. Sementara itu pada periode yang sama pada 2023 terdapat 209 kematian.

Dalam keterangan yang diterima dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Kamis (2/4), pada minggu ke-17 terdapat 88.593 kasus DBD, sementara pada periode yang sama pada 2023 ada 28.579 kasus.

Siti Nadia menyebut, lima kabupaten dan kota dengan kasus tertinggi yaitu Kota Bandung (3.468 kasus), Kabupaten Tangerang (2.540), dan Kota Bogor (1.944). "Kemudian Kota Kendari 1.659 kasus, dan Kabupaten Bandung Barat 1.576 kasus," kata Siti.

Sementara itu untuk angka kematian, ujunya, Kabupaten Bandung sebanyak 29 kematian, Kabupaten Jepara 21 kematian, Kota Bekasi 19 kematian. "Kabupaten Subang 18 kematian, dan Kabupaten Kendal 17 kematian," jelasnya.

Pada minggu ke-16 tahun 2024, menurut Siti Nadia,

* Bersambung hal 7 kol 5

DESANGLANGGERAN, PATUK, GUNUNGKIDUL

Desa Keuangan Pertama di Indonesia

di Gunungkidul, Kamis (2/5).

Dikatakan, sebenarnya dana dari Pemerintah untuk 75.000 desa di seluruh Indonesia dengan karak-

ter dan profil desa yang berbeda-beda. Salah satunya profil Desa Nglanggeran memiliki stori desa membangun desanya dengan sangat baik, cukup

bagus dengan ciri khas tersendiri seperti kombinasi antara potensi pertanian, wisata alam, kakao mulai dari bagaimana memberdayakan industri

kakao dari hulu hingga ke hilir. Serta sebagai desa wisata yang bisa digali.

"Kami sampaikan desa ini dapat dukungan dari

* Bersambung hal 7 kol 1



Peresmian Nglanggeran sebagai Desa Keuangan pertama di Indonesia.



● SELESAI ikut pengajian, Bu Sri tetangga saya bermaksud pulang bersama serombongan jamaah. Sampai tengah malam, ia belum pulang sehingga dicari keluarganya. Ia ditemukan sendirian di tengah jalan sepi. Ternyata ia salah ikut rombongan lain. (Tulus DS, Jalan Manthous Playen, Gunungkidul)-d